



RENCANA STRATEGIS

Tahun 2020 - 2024

**Balai Diklat Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Bogor**



BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BOGOR

Jalan Prada Samlawi, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor E-mail:
bdkrumpin@gmail.com

2020



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN BOGOR**

Nomor: SK. 59/BDLHK-2/2020

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BOGOR
TAHUN 2020 – 2024**

KEPALA BALAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa UPT wajib menyusun Rancangan Renstra UPT dengan berpedoman pada Renstra Eselon I;
 - b. bahwa Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor merupakan perangkat organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang memiliki tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan SDM LHK;
 - c. bahwa sehubungan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor Tahun 2020 – 2024 dengan Keputusan Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis (Renstra K/L) 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/ 10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor:P. 7/P2SDM/SET/REN.0/9/2020 Tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI DIKLAT LINGKUGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI DIKLAT LHK BOGOR TAHUN 2020 - 2024.

Pertama :Rencana Strategis Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bogor, 2 November 2020
Kepala Balai



Dr. Ir. Kusdamayanti,M.Si
NIP.19670815 199203 2 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI DIKLAT LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN BOGOR

NOMOR SK. 59/BDLHK-2/2020 TANGGAL 2 NOVEMBER 2020

TENTANG RENCANA STRATEGIS

BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BOGOR

TAHUN 2020 - 2024

DAFTAR ISI

	Hal
Surat Keputusan Kepala Balai.....	i i i
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	2
Daftar Gambar	3
Pengantar Kepala Balai	4
BAB I. Pendahuluan	5
1.1 Kondisi Umum	5
1.2 Potensi dan Permasalahan	9
BAB II. Visi, Misi, Tujuan 2020-2024	18
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian LHK.....	18
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Idikator Kinerja Program Badan P2SDM	20
BAB III. Kegiatan dan Komponen Kegiatan	23
3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Output Kegiatan	23
3.2 Komponen Kegiatan untuk masing-masing Kegiatan	23
3.3 Pengarusutamaan	24
BAB IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	27
4.1 Peta Sasaran Program Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan.....	27
4.2 Target Kinerja.....	28
4.3 Kerangka Pendanaan.....	29
BAB V. Penutup	30
Lampiran	31

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Realisasi Diklat BDLHK Bogor Tahun 2015-2019.....	7
Tabel 2. Komposisi Realisasi Diklat Berdasarkan Gender Tahun 2015 – 2019	8
Tabel 3. Fasilitas/Sarana Penyelenggaraan Diklat di Kampus Rumpin	10
Tabel 4. Fasilitas/Sarana Penyelenggaraan Diklat di Kampus Jampang Tengah.....	10
Tabel 5. Identifikasi Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman.....	14
Tabel 6. Penilaian Kualitatif Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman	14
Tabel 7. Penilaian Kuantitatif Faktor Kekuatan, kendala Tantangan dan Peluang	14
Tabel 8. Sasaran Badan P2SDM Tahun 2020-2024	21
Tabel 9. Sasaran Kegiatan Lingkup Badan P2SDM	21
Tabel 10. Sasaran Kegiatan pada BDLHK Bogor	23
Tabel 11. Komponen Kegiatan pada BDLHK Bogor.....	24
Tabel 12. Cascading BDLHK Bogor Tahun 2020-2024.....	28
Tabel 13. Target Kinerja BDLHK Bogor Tahun 2020-2024.....	29
Tabel 14. Rencana Alokasi Pembiayaan BDLHK Bogor Tahun 2020-2024	29

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi BDLHK Bogor.....	6
Gambar 2. Grafik Realisasi Anggaran BDLHK Bogor Tahun 2015-2019	7
Gambar 3. Diagram Komposisi Peserta Berdasarkan Gender	9
Gambar 4. Peta KHDTK Hutan Diklat Rumpin	11
Gambar 5. Peta KHDTK Hutan Diklat Jampang Tengah.....	12
Gambar 6. Kuadran Posisi BDLHK Bogor.....	15

PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor Tahun 2020 – 2024 disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024, Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Tahun 2020 – 2024, Renstra Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Tahun 2020 - 2024 dan Renstra Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020 – 2024.

Sebagai perangkat organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Renstra Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor ini merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, sasaran strategis dan indikator kinerja Presiden, Kementerian LHK, BP2SDM Kehutanan serta Pusat Diklat SDM LHK, khususnya pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Manusia LHK dan SDM Kehutanan Lainnya.

Penetapan sasaran kinerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor didasarkan pada identifikasi isu kebijakan Kementerian LHK, Program BP2SDM, uraian tugas dan fungsi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor. Selanjutnya, dilakukan perumusan tujuan, sasaran serta strategi pencapaiannya melalui analisis SWOT, yaitu untuk mengkonsolidasi kekuatan dan mengatasi kelemahan organisasi serta untuk mendayagunakan peluang yang tersedia dalam menghadapi tantangan dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Renstra ini merupakan pedoman bagi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, oleh karenanya perlu menyajikan arahan dan indikator kinerja yang jelas.

Kepala Balai,



Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si
NIP 19670815 199203 2 002

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sesuai target pembangunan nasional serta visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”***, Presiden menetapkan lima arahan utama yang menjadi strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 dengan Pembangunan Sumber Daya Manusia (1), Pembangunan Infrastruktur (2), Penyederhanaan Regulasi (3), Penyederhanaan Birokrasi (4), dan Transformasi Ekonomi (5).

Pembangunan SDM lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka mengoptimalkan fungsi hutan untuk mencapai manfaat lingkungan hidup, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari sangat dibutuhkan dalam dalam rangka mewujudkan target pembangunan nasional.

Pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa kepada Allah *subhanahu wata’ala*.

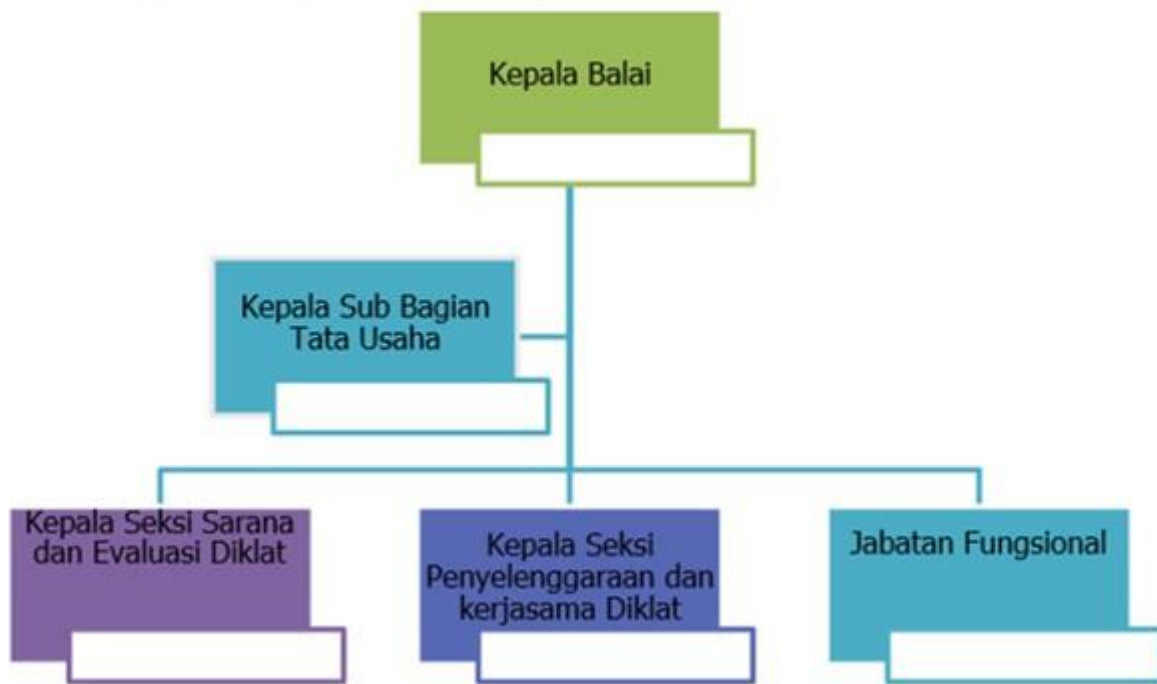
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan dapat dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat termasuk di dalamnya adalah Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor.

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah Badan P2SDM yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non-aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan wilayah kerja meliputi Provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor mempunyai fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan;
- 2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- 3) Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan;
- 6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan;
- 7) Pelaksanaan pelayanan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan;
- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan dibantu oleh 3 (tiga) pejabat Eselon IV yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat, Kepala Seksi Sarana dan Evaluasi Diklat serta kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana gambar berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Diklat LHK Bogor

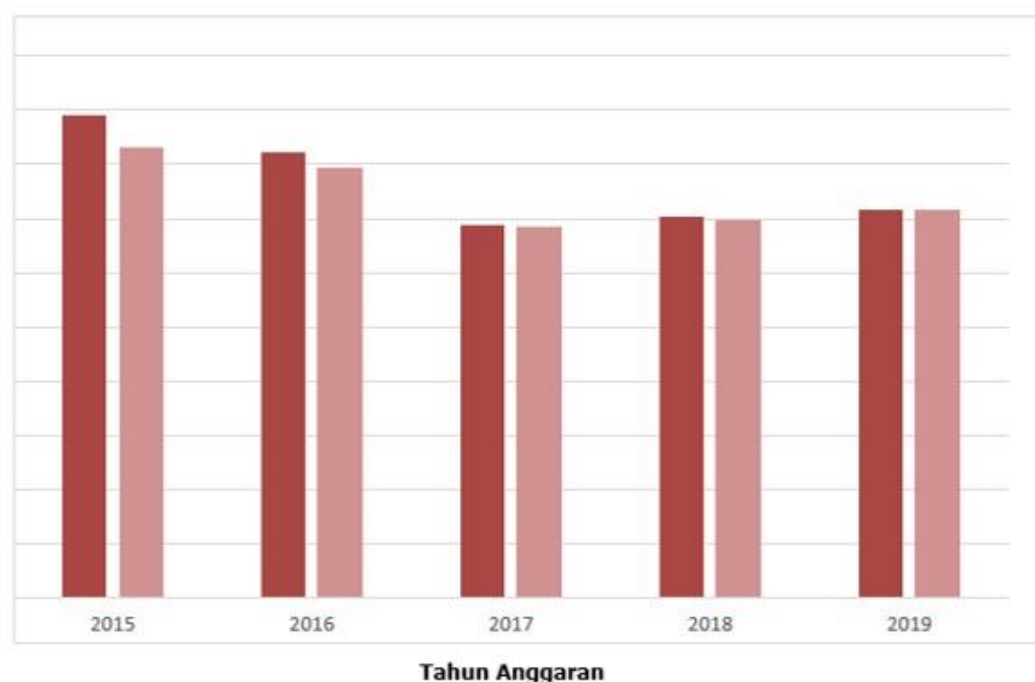
Adapun tugas masing-masing sub bagian adalah sebagai berikut:

- Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.
- Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan diklat (IKD), penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan.
- Seksi Sarana dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pelayanan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan.

➤ **Capaian Renstra Balai Diklat LHK Bogor Tahun 2015-2019**

❖ **Pelaksanaan Anggaran BDLHK Bogor Tahun 2015 – 2019**

Anggaran DIPA Balai Diklat LHK Bogor Tahun 2015 – 2019 sebesar Rp76.436.320.000 yang berasal dari dana Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Anggaran tersebut secara umum diperuntukan bagi pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, penyelenggaraan diklat, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana diklat. Realisasi anggaran selama Tahun 2015 – 2019 adalah sebesar Rp. 74.443.109.139 (97,39%). Pagu dan realisasi pelaksanaan anggaran seperti tercantum di bawah ini:



	2015	2016	2017	2018	2019
Pagu (x 1.000)	17.817.777	16.458.723	13.740.00	14.100.00	14.319.820
Realisasi (x 1.000)	16.606.25	15.903.999	13.686.60	13.926.661	14.319.589

Gambar 2. Grafik realisasi pelaksanaan anggaran lingkup Balai Diklat LHK Bogor pada tahun 2015 -2019

❖ Pelaksanaan Diklat Tahun 2015 - 2019

Pelaksanaan diklat di Balai Diklat LHK Bogor sebagian besar didukung oleh dana yang bersumber dari APBN yang teralokasikan dalam DIPA Satuan Kerja (Satker). Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor telah menyelenggarakan diklat dengan lulusan sebanyak 3.287 orang peserta dari target renstra Tahun 2015 - 2019 sebanyak 3.305 orang peserta (99,94%) yang terdiri dari Diklat Teknis, Diklat Administrasi, Diklat Fungsional, Diklat bagi Tenaga Bakti Rimbawan, Diklat Tenaga Pendamping bagi KTH dan diklat bagi non aparatur (masyarakat) dengan perincian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rencana dan realisasi diklat lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun 2015 - 2019

No. Jenis diklat		Jumlah peserta per tahun (orang)									
		Rencana					Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Diklat aparatur	758	627	450	390	330	740	627	450	390	330
	- Teknis	698	347	420	300	270	680	347	420	300	270
	- Fungsional	60	30	-	-	30	60	30	-	-	30
	- Administrasi	-	-	-	30	-	-	-	-	30	-
	- Tenaga Bakti Rimbawan	-	250	30	-	-	-	250	30	-	-
	- Tenaga Pendamping KTH	-	-	-	60	30	-	-	-	60	30

2. Diklat non aparaturn	120	-	-	540	90	120	-	-	540	90
Jumlah	878	627	450	930	420	860	627	450	930	420
Total Peserta	3.305					3.287				

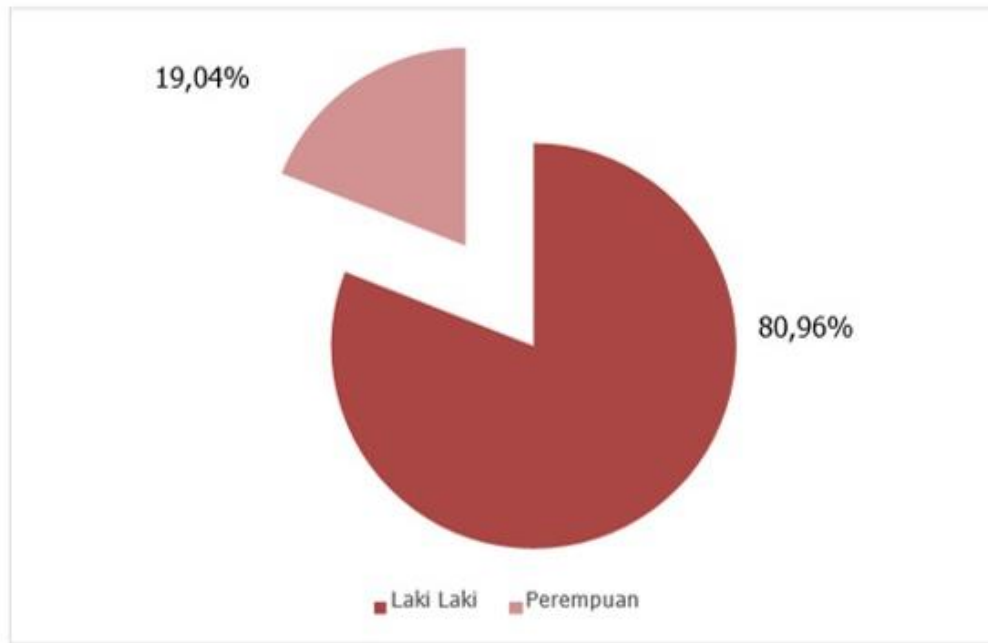
Selama kurun waktu 5 tahun BDLHK Bogor merencanakan peserta diklat aparaturn sebanyak 2.275 orang dengan realisasi peserta sebanyak 2.257 orang (99,21%) sedangkan rencana peserta diklat non aparaturn adalah sebanyak 750 orang dengan realisasi sebanyak 750 orang (100%).

Peserta diklat tahun 2015 – 2019 secara umum terdiri dari peserta laki-laki dan perempuan tetapi ada beberapa diklat yang hanya diikuti oleh peserta laki-laki. Komposisi realisasi peserta diklat berdasarkan gender sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Komposisi realisasi peserta diklat berdasarkan gender

No	Jenis Diklat/Tahun	Jumlah Peserta (Orang)		Total
		Laki-laki	Perempuan	
A	Aparatur			
1	2015	628	112	740
2	2016	417	210	627
3	2017	368	82	450
4	2018	295	95	390
5	2019	251	79	330
	Jumlah	1.959	578	2.537
B	Non Aparatur	-	-	-
1	2015	111	9	120
2	2016	-	-	-
3	2017	-	-	-
4	2018	510	30	540
5	2019	81	9	90
	Jumlah	702	48	750
	Total Peserta	2.661	626	3.287

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa sebagian besar peserta diklat pada tahun 2015 – 2019 masih lebih banyak peserta laki-laki dibanding peserta perempuan. Peserta diklat aparaturn laki-laki berjumlah 1.959 orang sedangkan peserta perempuan hanya 578 orang. Peserta diklat non aparaturn umumnya didominasi oleh peserta laki-laki terutama pada tahun 2015, 2018 dan 2019. Komposisi peserta berdasarkan gender selama kurun waktu 2015 – 2019 terdiri dari peserta laki-laki sebanyak 2.661 orang atau sebesar 80,96% dan peserta perempuan sebanyak 626 orang atau sebesar 19,04% (Gambar 3).



Gambar 3. Komposisi Peserta berdasarkan Gender

1.2 .1 Potensi dan Permasalahan

➤ Potensi

Balai Diklat LHK Bogor yang dulunya bernama Balai Latihan Kehutanan Bogor berdiri sejak tahun 1956 di bawah naungan Departemen Pertanian. Sejak tahun 1983 Balai Latihan Kehutanan Bogor berada di bawah Departemen Kehutanan dan pada tahun 1996 berpindah lokasi dari Jl. Gunung Batu ke Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Berdasarkan sejarah tersebut Balai Diklat LHK Bogor telah memiliki pengalaman yang cukup lama dalam penyelenggaraan diklat bidang kehutanan. Keberhasilan pengembangan sumberdaya manusia melalui diklat tidak terlepas dari potensi yang selama ini dimiliki oleh Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor antara lain yaitu: sumberdaya manusia, sarana dan prasarana diklat serta sistem dan prosedur kerja yang memadai.

➤ Sumber Daya Manusia

Tenaga pengelola pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor sebanyak 79 orang yang terdiri dari pejabat struktural (3 orang), fungsional umum (43 orang), widyaiswara (14 orang), Arsiparis (1 orang), Penyuluh (2 orang), PPNPN (13 orang) dan Tenaga Bakti Rimawan (3 orang). Dari segi kuantitas baik tenaga pengajar (widyaiswara) maupun staf pelaksana maka Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor telah memiliki SDM yang cukup dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasinya sedangkan dari segi kualitas masih perlu peningkatan.

➤ Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Diklat Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor memiliki fasilitas yang berada di 2 (dua) lokasi yaitu di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dan Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi. Sarana prasarana pendukung diklat yang dimiliki berupa fasilitas perkantoran serta fasilitas diklat berupa asrama, ruang kelas, perpustakaan, aula, ruang makan, gedung serbaguna serta sarana penunjang lainnya seperti mesjid, sarana olahraga serta

barang-barang inventaris yang meliputi fasilitas diklat, alat peraga dan alat bantu praktek (Tabel 3 dan Tabel 4).

Tabel 3. Fasilitas/Sarana Penyelenggaraan Diklat BDLHK Bogor di Kampus Rumpin

NO.	JENIS	UNIT	VOLUME
1.	Gedung Kantor	1	2.096 m ²
2.	Gedung Pendidikan	1	1.032 m ²
3.	Asrama	2	5.147 m ²
4.	Ruang Makan, Gedung Serbaguna & Laundry	1	2.070 m ²
5.	Selasar	1	100 m ²
6.	Mesjid	1	24 m ²
7.	Ruang Generator	1	50 m ²
8.	Gapura	1	500 m ²
9.	Arboretum	1	500 m ²
10.	Penangkaran Kupu –Kupu	1	24 m ²
11.	Tower Air	2	112 m ²
12.	Pos Jaga	1	12 m ²

Tabel 4. Fasilitas/Sarana Penyelenggaraan Diklat BDLHK Bogor di Kampus Jampang Tengah

No.	Jenis	Unit	Volume
1.	Ruang Instruktur	1	288 m ²
2.	Guest House	2	151 m ²
3.	Asrama	3	720 m ²
4.	Ruang Makan dan Dapur	1	450 m ²
5.	Ruang Kelas dan WC	2	170 m ²
6.	Gudang	1	120 m ²
7.	Musholla	1	140 m ²
8.	Ruang Pemetaan/Ukur	1	140 m ²
9.	Perpustakaan	1	171 m ²
10.	Menara Pengawas Kebakaran	1	120 m ²
11.	Pintu Gerbang/Gapura	1	-
12.	Pintu Gerbang Besi	1	-
13.	Pos Jaga	1	-
14.	Ruang Diesel	2	18 m ²
15.	Penakar Curah Hujan	2	12 m ²
16.	Pal Batas	1	225 m ²
17.	Gudang Kerja Persemaian	1	12 m ²
18.	Chek Dam	1	36 m ²
19.	Bak Penampungan Air	1	84 m ²
20.	Bak Penampungan Air	2	20 m ²
21.	Ruang Informasi	1	2.000 m ²

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor juga mempunyai 2 (dua) unit hutan diklat yaitu Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Diklat Rumpin dan Hutan Diklat Jampang Tengah.



Gambar 4. Peta KHDTK Hutan Diklat Rumpin

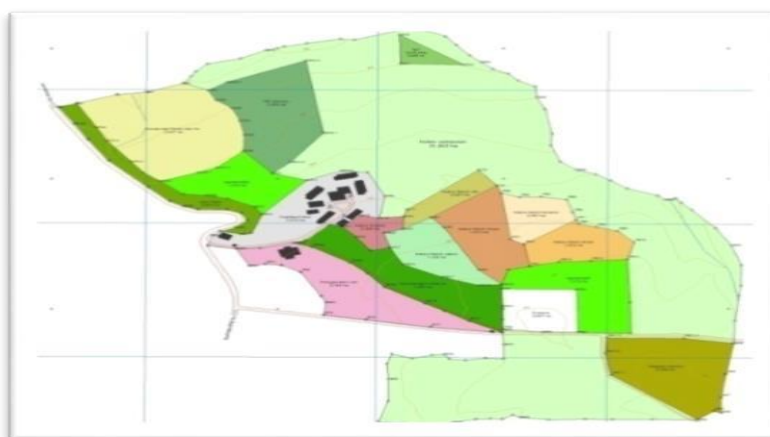
KHDTK Hutan Diklat Rumpin adalah kawasan hutan dengan fungsi pokok sebagai hutan konservasi (Taman Wisata Alam) yang diperuntukan bagi kepentingan pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan (Keputusan Menteri kehutanan Nomor: SK. 338/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010). Secara administratif terletak di Desa Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Luas Hutan Diklat Kehutanan adalah seluas 66,80 hektar. Akan tetapi berdasarkan pelaksanaan Rekonstruksi Tata Batas yang dilaksanakan oleh BPKH Wilayah XI Yogyakarta, luas KHDTK Hutan Diklat Rumpin adalah 75,350 hektar yang terdiri dari Hutan Pendidikan dan Pelatihan seluas 63,614 hektar (Blok I 9,854 hektar, Blok II 2,714 hektar, Blok III 43,579 hektar dan Blok IV 7,467 hektar) dan Taman Makam Rimbawan seluas 11,736 hektar.

Pada tahun 2019 dilakukan inventarisasi potensi tegakan pohon dengan cara sampling. Hasil inventarisasi tegakan di Blok I ditemukan 8 jenis pohon. Jenis pohon yang paling dominan adalah Mahoni (*Swietenia macrophylla*) dengan kondisi berupa tegakan campuran. Sedangkan hasil inventarisasi tegakan di Blok II ditemukan 7 jenis pohon. Jenis-jenis pohon yang dominan antara lain Meranti (*Shorea sp.*), Pulai (*Alstonia scholaris*) dan Ki Acret (*Spathodea campanulata*). Tegakan Meranti (*Shorea sp.*) di Blok II ditanam secara monokultur, sedangkan Pulai (*Alstonia scholaris*) dan Ki Acret (*Spathodea campanulata*) berupa tegakan heterokultur (campuran). Hasil inventarisasi di Blok III ditemukan 16 jenis pohon. Keragaman jenis pohon di Blok III lebih banyak dibandingkan dengan blok lain. Selain itu, di Blok III juga terdapat arboretum yang merupakan koleksi jenis pohon sehingga tumbuh berbagai jenis pohon. Sedangkan jenis pohon yang dominan di Blok III yaitu, Akasia (*Acacia mangium*) dan Ampupu (*Eucalyptus sp.*). Selain arboretum yang berupa tegakan campuran, di Blok III bisa ditemukan tegakan Akasia (*Acacia mangium*) dan Ampupu (*Eucalyptus sp.*) yang ditanam secara monokultur. Sedangkan hasil inventarisasi tegakan di Blok IV ditemukan 5 jenis pohon. Jenis yang mendominasi yaitu, Mahoni (*Swietenia macrophylla*), Rambutan (*Nephelium lappaceum*)

dan Merbau (*Intsia bijuga*) pada tingkat pertumbuhan tiang dan pancang. Jenis pohon di Blok I, II, III dan IV.

Sarana prasarana penunjang diklat di KHDTK Hutan Diklat Rumpin yang pengelolaannya berada di bawah Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor terdiri dari demplot persemaian, demplot tanaman obat, demplot penangkaran kupu-kupu, arboretum, demplot konservasi tanah dan air, demplot agroforestry, Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT) *A. mangium* dan TBT *Eucalyptus deglupta*. Sarana prasarana lainnya antara lain fasilitas sumber benih dan persemaian RSSNC yang pengelolaannya berada di bawah Ditjen BPDAS PS (18 ha) serta areal penelitian Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan – Ciheuleut Bogor (9 ha).

Selain itu, Balai Diklat LHK Bogor memiliki hutan diklat di Jampang Tengah, Sukabumi. Hutan Diklat Jampang Tengah merupakan aset tanah Kementerian Kehutanan yang diperuntukan bagi kepentingan sarana penunjang praktek diklat bidang kehutanan. Secara administratif terletak di Kampung Ciareuy, Desa Sindang Resmi, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Luas kawasan seluruhnya 45,148 ha yang terdiri dari tanah seluas 43,078 ha (sertifikat No. 10.11.07.4.00003) berdasarkan SK BPN Provinsi Jawa Barat No. 402/HP/KWBPN/1995 dan tanah seluas 2,07 ha (sertifikat No.10.11.07.4.00004) berdasarkan SK Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat No. 51/HP/KWBPN/1997. Pengelolaan Hutan Diklat Jampang berada di bawah Balai Diklat lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor Cq. Seksi Sarana dan Evaluasi Diklat. Potensi tegakan berupa kawasan hijau dengan estimasi volume sebesar 474,92 m³ dari 42 spesies. Jenis pohon yang mendominasi adalah Mahoni, Kisapatu, Pulai, Jati Putih, Akasia dan buah-buahan. Potensi satwa yang sering muncul antara lain burung, babi hutan, tupai, musang, ular dan kupu-kupu sedangkan yang sewaktu-waktu terlihat antara lain renggiling dan landak.



Gambar 5. Peta Hutan Diklat Jampang Tengah

➤ PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi Balai Diklat LHK Bogor dalam upaya pencapaian sasaran kegiatan pada Tahun 2015 - 2019 antara lain sebagai berikut:

- a. Diklat yang dilaksanakan terkadang belum menunjang/sejalan dengan pola karier dari calon peserta sehingga minat peserta dalam mengikuti diklat cenderung rendah terutama untuk diklat-diklat yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
- b. Perencanaan diklat belum sepenuhnya dilaksanakan dengan optimal mengingat karena adanya keterbatasan anggaran maka kegiatan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) secara lengkap tidak dapat dilaksanakan setiap tahun sehingga diklat-diklat yang dilaksanakan tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan calon peserta. IKD dilaksanakan masih secara sederhana dan belum menyeluruh untuk semua wilayah pelayanan.
- c. Evaluasi diklat terutama untuk kegiatan Evaluasi Pasca Diklat belum bisa dilaksanakan setiap tahun mengingat terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga dampak dari diklat belum dapat diukur secara maksimal.
- d. Kapasitas asrama dan ruang kelas BDLHK Bogor dalam penyelenggaraan diklat masih kurang memadai dan penggunaannya masih belum optimal mengingat diklat yang diselenggarakan sangat sedikit, selain itu fasilitas yang tersedia masih harus dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya seperti laboratorium komputer mengingat kedepannya akan diberlakukan pelatihan secara e- learning.
- e. Kurangnya kualitas SDM LHK
Salah satu permasalahan yang dihadapi BDLHK Bogor adalah kurangnya kualitas SDM LHK dalam memahami peran sebagai pelaksana kegiatan, sehingga kinerja SDM kurang optimal. Kurang optimalnya kinerja aparatur dan non aparatur tersebut berdampak pada penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik.
- f. Peningkatan kapasitas SDM LHK belum optimal
Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas pegawai.

1.2.2 Identifikasi Lingkungan (Analisis SWOT)

Salah satu proses dalam konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pembangunan. Analisis dilakukan melalui pendekatan SWOT yang didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) serta secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*). Analisis lingkungan strategis dilakukan dengan menyusun asumsi-asumsi strategis dan mengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan.

Berdasarkan identifikasi terhadap faktor-faktor lingkungan strategis baik internal maupun eksternal maka dilakukan evaluasi terhadap kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*) peluang (*opportunity*) serta ancaman (*threat*) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Identifikasi faktor kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*) peluang (*opportunity*) serta ancaman (*threat*)

STRENGTH (S) 1. Organisasi BDLHK Bogor memiliki dasar hukum yang kuat 2. Tersedianya regulasi pendukung penyelenggaraan diklat 3. Tersedianya sumberdaya manusia dengan jumlah yang memadai 4. Sarana prasarana penunjang kediklatan yang relatif memadai	WEAKNESS (W) 1. Kurangnya kualitas SDM yang memenuhi kebutuhan dan tuntutan kompetensi 2. Lemahnya pengelolaan sarana dan prasarana diklat 3. Budaya organisasi inovatif belum berkembang 4. Belum optimalnya pengelolaan KHDTK untuk sarana pembelajaran kediklatan
OPPORTUNITY (O) 1. Dukungan peraturan perundangan ASN 2. Tuntutan ketersediaan SDM kehutanan yang kompeten 3. Tersedianya dukungan para pihak dalam bidang kediklatan 4. Tuntutan perkembangan teknologi dan Revolusi 4.0	THREATS (T) 1. Belum jelasnya pembagian yurisdiksi diklat antara Pusdiklat dengan Balai Diklat 2. Diklat belum menjadi bagian dari sistem karir pegawai 3. Belum terwujudnya perilaku ramah lingkungan di masyarakat sekitar KDHTK

Tabel 6. Penilaian Kuantitatif Faktor Kekuatan, Kendala, Tantangan dan Peluang

No	Identifikasi	Bobot	Nilai	Tertimbang
		(0 - 1)	(1 - 5)	
STRENGTH (S)				
1	Organisasi BDLHK Bogor memiliki dasar hukum yang kuat	0,2	3	0,6
2	Tersedianya regulasi pendukung penyelenggaraan diklat	0,2	2	0,4
3	Tersedianya sumberdaya manusia dengan jumlah yang memadai	0,3	3	0,9
4	Sarana prasarana penunjang kediklatan yang relatif memadai	0,3	3	0,9
	SKOR STRENGTH (S)	1		2,8
WEAKNESS (W)				
1	Kurangnya kualitas SDM yang memenuhi kebutuhan dan tuntutan kompetensi	0,3	2	0,6
2	Lemahnya pengelolaan sarana dan prasarana diklat	0,3	2	0,6
3	Budaya organisasi inovatif belum berkembang	0,1	1	0,1
4	Belum optimalnya pengelolaan KHDTK untuk sarana pembelajaran kediklatan	0,3	3	0,9
	SKOR WEAKNESS (W)	1,0		2,1
	SELISIH SKOR S - SKOR W			0,7

No	Identifikasi	Bobot	Nilai	Tertimbang
		(0 - 1)	(1 - 5)	
OPPORTUNITY (O)				
1	Dukungan peraturan perundangan ASN	0,3	2	0,6
2	Tuntutan ketersediaan SDM kehutanan yang kompeten	0,4	3	1,3
3	Tersedianya dukungan para pihak dalam bidang kediklatan	0,1	2	0,3
4	Tuntutan perkembangan teknologi dan Revolusi 4.0	0,1	1	0,1
	SKOR OPPORTUNITY (O)	1,0		2,3
THREATS (T)				
1	Belum jelasnya pembagian yurisdiksi diklat antara Pusdiklat dengan Balai Diklat	0,4	2	0,8
2	Diklat belum menjadi bagian dari sistem karir pegawai	0,4	2	0,8
3	Belum terwujudnya perilaku ramah lingkungan di masyarakat sekitar KDHTK	0,2	1	0,2
	SKOR THREATS (T)	1,0		1,8
	SELISIH SKOR S - SKOR W			0,5

Berdasarkan hasil penilaian faktor-faktor SWOT di atas, matrik posisi Balai Diklat LHK Bogor saat ini seperti tercantum pada tabel berikut.

Tabel 7. Matrik Posisi Balai Diklat LHK Bogor

Indikator	Skor Tertimbang	Indikator	Skor Tertimbang
Kekuatan	2,8	Peluang	2,3
Kelemahan	2,1	Ancaman	1,8
Keseimbangan	0,7	Keseimbangan	0,5



Gambar 6. Kuadran Posisi Balai Diklat LHK Bogor

Kedudukan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi terhadap faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) adalah pada kuadran I yaitu sebagaimana tertera pada Gambar 6. Posisi kuadran I menandakan bahwa Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor berada pada kondisi kuat dan berpeluang (Rangkuti, 2008). Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Strategi Progresif yang berarti organisasi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor berada dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan pengembangan penyelenggaraan diklat yang profesional guna memenuhi tuntutan peningkatan SDM kehutanan yang kompeten.

Posisi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor berdasarkan analisa SWOT adalah pada kuadran I tetapi strategi yang diformulasikan adalah dengan mempertimbangkan seluruh faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Strategi Kekuatan - Kelemahan (S-O)

- a. Mengoptimalkan kekuatan dasar hukum organisasi Balai Diklat Kehutanan Bogor untuk memenuhi peningkatan kebutuhan SDM kehutanan yang kompeten
- b. Meningkatkan fungsi regulasi pendukung penyelenggaraan diklat dalam memanfaatkan SKKNI, peta kompetensi dan kerjasama diklat untuk memenuhi kebutuhan SDM Kehutanan yang kompeten yang semakin meningkat

2. Strategi Kekuatan - Ancaman (S-T)

- a. Meningkatkan fungsi dasar hukum dan regulasi pendukung penyelenggaraan diklat di Balai Diklat Kehutanan untuk menghindari pembagian yuridiksi diklat antara Pusdiklat dengan Balai Diklat yang belum jelas
- b. Meningkatkan fungsi dasar hukum dan regulasi pendukung penyelenggaraan diklat untuk menghindari diklat yang sekedar formalitas menjadi diklat yang merupakan bagian dari sistem karier pegawai

3. Strategi Kelemahan - Peluang (W-O)

- a. Meningkatkan kapasitas tenaga pengelola dan widyaiswara dengan memanfaatkan kebijakan SKKNI, peta kompetensi dan kerjasama diklat untuk memenuhi kebutuhan SDM kehutanan yang kompeten yang semakin meningkat
- b. Mengefektifkan pelaksanaan IKD dan EPD yang komprehensif dengan memanfaatkan SKKNI, peta kompetensi untuk memenuhi SDM kehutanan yang kompeten
- c. Mengefektifkan pelaksanaan IKD dan EPD yang komprehensif melalui kerjasama diklat

4. Strategi Kelemahan – Ancaman (W-T)

- a. Menyediakan tenaga pengelola dan widyaiswara yang kompeten untuk menghadapi belum jelasnya pembagian yuridiksi diklat antara Pusdiklat dengan Balai Diklat
- b. IKD dan EPD dilaksanakan secara efektif dan komprehensif agar diklat menjadi bagian dari sistem karier pegawai

Peta posisi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor pada kuadran I (positif, positif) menekankan strategi progresif dengan strategi alternatif yang memungkinkan untuk diimplementasikan yaitu:

Strategi alternatif I: Mengoptimalkan kekuatan dasar hukum organisasi Balai Diklat Kehutanan Bogor untuk memenuhi peningkatan kebutuhan SDM kehutanan yang kompeten

Strategi alternatif II: Meningkatkan fungsi regulasi pendukung penyelenggaraan diklat dalam memanfaatkan SKKNI, peta kompetensi dan kerjasama diklat untuk memenuhi kebutuhan SDM Kehutanan yang kompeten yang semakin meningkat

Berdasarkan strategi alternatif di atas maka strategi kebijakan yang dapat diterapkan antara lain melalui pemantapan Kelembagaan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor termasuk pengelolaan sarana prasarana dan KHDTK Hutan Diklat, Peningkatan kualitas SDM pengelola dan widyaiswara serta peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui:

1. Peningkatan sosialisasi dan koordinasi terkait dasar hukum dan regulasi pendukung penyelenggaraan diklat pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor kepada pihak lain
2. Menghimpun dan mengoptimalkan fungsi regulasi pendukung penyelenggaraan diklat
3. Pemanfaatan/optimalisasi penggunaan SKKNI dan peta kompetensi dalam penyelenggaraan diklat (input, proses, output)
4. Meningkatkan kerjasama kediklatan (materi dan model/sistem kerjasama) yang terdiri dari IKD, kurikulum, pengajar, pengelola dan pelaksanaan.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian LHK

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Adapun rumusan Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah: **“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**. Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selaras dengan rumusan di atas, yaitu : **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dalam mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait langsung dengan misi Presiden ke-4 yaitu **“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”**. Pernyataan pada misi tersebut menjadi acuan dalam merumuskan lebih lanjut misi KLHK. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi KLHK, misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai penjabarannya, terdapat 4 (empat) rumusan tujuan dari KLHK untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim,
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup,

3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan,
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis KLHK disusun dengan menjabarkan tujuan KLHK yang juga memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan Visi dan Misi KLHK. Adapun rumusan sasaran strategis KLHK adalah:

1. Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim (SS-1)

Indikator pada SS-1 adalah:

- 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- 2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi dari 5 Sektor Pembangunan;
- 3) Penurunan Laju Deforestasi;
- 4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah;
- 5) Luas Pemulihan Kondisi Lahan dalam DAS;
- 6) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - *High Conservation Values*)

2. Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (SS-2)

Indikator pada SS-2 adalah:

- 1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional;
- 2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting;
- 3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3. Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan (SS-3)

Indikator pada SS-3 adalah:

- 1) Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan;
- 2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
- 3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat

4. Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik (SS-4)

Indikator pada SS-4 adalah:

- 1) Kategori Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan;
- 2) Penyelesaian Kasus bidang LHK;
- 3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE);
- 4) Hasil Litbang yang Inovatif dan Implementatif;
- 5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KLHK;
- 6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK;
- 7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK;
- 8) Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) KLHK.

2.2 Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan dan Indikator Kinerja Program Badan P2SDM

Visi dan Misi Badan P2SDM untuk 2020-2024 mengacu pada Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden RI yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”* serta rumusan Visi KLHK yaitu *“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”*. Berdasarkan rumusan tersebut, visi Badan P2SDM dalam mendukung visi KLHK adalah **“Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Inovatif, Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”**.

Untuk mewujudkan visi Badan P2SDM tersebut, misi Badan P2SDM disusun dengan mengacu pada misi Presiden ke-4 yaitu *“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”* serta misi KLHK yang sudah dirumuskan. Berdasarkan tugas dan fungsinya, misi Badan P2SDM untuk mendukung terlaksananya misi KLHK adalah:

1. Meningkatkan sistem penyelenggaraan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan yang terpadu;
2. Merevitalisasi sistem pendidikan SMK kehutanan;
3. Merevitalisasi dan melakukan pengembangan sistem pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Mengembangkan pelatihan dan pemagangan masyarakat berbasis usaha kehutanan dan lingkungan (komoditas);
5. Mengembangkan sistem standardisasi dan sertifikasi profesi LHK yang berbasis kompetensi dan daya saing;
6. Mewujudkan generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima di BP2SDM.

Berdasarkan visi dan misi Badan P2SDM yang telah disebutkan di atas, rumusan tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah **“Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan”**. Melalui tujuan ini diharapkan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat semakin meningkat, inovatif, memiliki daya saing tinggi dan mampu adaptif dengan perkembangan zaman saat ini.

Badan P2SDM mendukung sasaran strategis 4 KLHK yaitu *“Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik (SS-4)”*. Indikator utama yang didukung oleh Badan P2SDM yaitu (1) Kategori Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan; (2) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KLHK; dan (3) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK. Untuk mendukung indikator utama tersebut, Badan P2SDM memiliki 6 (enam) indikator kinerja program dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja kegiatan. Adapun 6 IKP dan sasarannya adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Sasaran Badan P2SDM Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis KLHK	Indikator Kinerja Utama KLHK	Sasaran Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program
Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik (SS-4)	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan (IKU-13)	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) / Hutan Diklat (SP-1)	Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK / Hutan Diklat (IKP-1)
	Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK (IKU-19)	Tersertifikasinya SDM LHK yang Kompeten (SP-2)	Sertifikasi Kompetensi SDM LHK (IKP-2)
		Meningkatnya Kompetensi SDM LHK (SP-3)	Peningkatan kompetensi SDM LHK (IKP-3)
		Terbentuknya Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Masyarakat yang terakreditasi (SP-4)	Lembaga pelatihan pemagangan usaha masyarakat (IKP-4)
		Meningkatnya Jumlah Lembaga/Komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (SP-5)	Jumlah lembaga / komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup (IKP-5)
	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (IKU-17)	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (SP-6)	Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (IKP-6)

Berdasarkan program pada Badan P2SDM, terdapat enam kegiatan pada lingkup Badan P2SDM. Untuk mendukung keberhasilan tercapainya setiap kegiatan, sasaran dan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 9. Sasaran Kegiatan Lingkup Badan P2SDM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.Perencanaan Pengembangan SDM	Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten	Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK
		Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK
		Jumlah SDM LHK bersertifikat kompetensi
2.Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK	Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah SDM LHK di tingkat tapak yang Kompeten
		Lulusan diklat aparatur dan non aparatur LHK
		SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa
		Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha

	Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK)/Hutan Diklat	Nilai KHDTK yang dikelola
3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan Kehutanan	Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat
4. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Meningkatnya Kapasitas masyarakat dan generasi muda peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup	Jumlah satuan pendidikan dan lembaga masyarakat dan komunitas peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup
		Jumlah SDM lembaga masyarakat dan komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup
5. Peningkatan Penyuluhan	Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat	Jumlah KTH Mandiri
		Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS (Pembentukan Wanawiyata Widyakarya)
		Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS
		Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang Handal
6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Badan P2SDM	Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
		Level Maturitas SPIP
		Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor sebagai unit teknis dibawah Badan P2SDM, akan sepenuhnya berkomitmen mendukung visi dan misi yang dicanangkan dengan melaksanakan kegiatan sebagaimana fungsinya.

BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Ouput Kegiatan

Penyelenggaraan diklat merupakan salah satu pendukung sasaran strategis Kementerian LHK. Oleh karena itu, Renstra Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor mengacu pada arah dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM LHK yang telah ditetapkan sebagai sasaran utama Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dan pada Renstra Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan program pada Badan P2SDM, terdapat tiga kegiatan pada lingkup Balai Diklat LHK Bogor. Untuk mendukung keberhasilan tercapainya setiap kegiatan, sasaran dan output kegiatan disusun secara relevan seperti yang tercantum pada Tabel berikut.

Tabel 10. Sasaran Kegiatan pada Balai Diklat LHK Bogor

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Ouput Kegiatan
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK	Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Aparatur)
		Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Non Aparatur)
	Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK)/Hutan Diklat	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup
2. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Meningkatnya Kapasitas masyarakat dan generasi muda peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup	Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Non Aparatur)
3. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Badan P2SDM	Layanan Perkantoran
		Layanan Umum

3.2 Komponen Kegiatan Untuk Masing-masing Ouput Kegiatan

Berdasarkan output kegiatan yang ditetapkan, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor memiliki komponen-komponen kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 11. Komponen Kegiatan pada Balai Diklat LHK Bogor

Output Kegiatan	Komponen Kegiatan	Satuan Ouput
Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Aparatur)/DCE	1. Pelatihan Teknis dan Fungsional 2. Pendukung Kediklatan	Orang
Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Non Aparatur)/SCE	1. Pelatihan SDM Non Aparatur LHK 2. Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis bidang LHK	Orang
Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	Poin
Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Non Aparatur)	Pelatihan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Orang
Layanan Perkantoran	1.Gaji dan Tunjangan 2.Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan
Layanan Umum	1.Penyusuna rencana program dan anggaran 2.Pelaksanaan pemantaun dan evaluasi 3.Pengelolaan kepegawaian 4.Pelayanan umum dan Perlengkapan	Layanan
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 2.Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	Layanan

3.3 Pengarusutamaan (*mainstreaming*)

Salah satu dasar kebijakan untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan adalah pengarusutamaan. Kementerian LHK memiliki 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Rensta) KLHK 2020-2024. Pengarusutamaan merupakan salah satu upaya mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, sehingga dapat memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. 4 pengarusutamaan, dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung yaitu:

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan

sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarustamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's).

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan, (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender, (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender, dan (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Balai Diklat LHK Bogor telah aktif dalam pelaksanaan percepatan pengarusutamaan kesetaraan gender. Lembaga diklat yang ada saat ini sudah mulai menyediakan sarana prasarana yang mempertimbangkan kesetaraan gender. Saat ini Balai Diklat LHK Bogor juga mulai mengembangkan kriteria lembaga diklat yang responsif gender, termasuk di dalamnya metode dan kurikulum yang diperlukan dalam pelaksanaan diklat.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial dan budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*.

Balai Diklat LHK Bogor akan sepenuhnya berkomitmen untuk dapat mewujudkan kebijakan pada setiap pengarusutamaan yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANKA PENDANAAN

4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan

Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah yang mencerminkan berfungsinya keluaran. Sasaran kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.

Pada Tahun 2020, terdapat kebijakan baru terkait restrukturisasi/redesain Program pada Kementerian LHK. Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S.375/MK.02/2020 dan Nomor B.308/M.PPN/D/PP.04.03/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 perihal daftar Program Kementerian/Lembaga, Program Kementerian LHK mulai Tahun 2021 mengalami restrukturisasi menjadi 6 (enam) program. Kebijakan ini juga menjadi dasar penyusunan dokumen Rencana Strategis Unit Kerja Kementerian LHK Tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil pembahasan secara resmi bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, Badan P2SDM yang sebelumnya termasuk ke dalam satu program yaitu Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi masuk ke dalam tiga program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima; serta Meningkatnya Kompetensi SDM LHK.
2. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan sasaran Meningkatnya Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Masyarakat.
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) / Hutan Diklat; serta Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK.

Sebagai unit pelaksana dari Badan P2SDM, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor mendukung sasaran strategis 4 Kementerian LHK yaitu “Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik (SS-4)”. Untuk mendukung keberhasilan tujuan dari sasaran tersebut, berikut cascading Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor Tahun 2020-2024

Tabel 12. Cascading BDLHK Bogor Tahun 2020-2024

IKU	IKP	IKK	Satuan Target	Komponen
IKU No.13. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan	01-Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK (IKP 1)	1-Nilai KHDTK yang dikelola (IKK 01)	Poin	Pengelolaan KHDTK
IKU No.19. Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	02-Peningkatan Kompetensi SDM LHK (IKP 3)	02-Lulusan diklat aparatur dan non aparatur LHK (IKK 06)	Orang	Pelatihan SDM Aparatur dan Non Aparatur ang ditingkatkan
		03-Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha (IKK 08)	Orang	Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK
	03-Jumlah lembaga/komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup (IKP 5)	04-Jumlah SDM masyarakat yang terlatih, peduli dan berbudaya lingkungan (IKK 15)	Orang	Pelatiha Masyarakat bidang LHK

Selain itu, untuk mencapai program yang telah ditetpkan, Balai Diklat Lingkungn Hidup dan Kehutanan Bogor mengemban 2 kegiatan utama dan 1 (satu) kegiatan dukungan manajemen yaitu:

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK;
2. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan;
3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Badan P2SDM;

4.2 Target Kinerja

Target yang terdapat pada indikator kinerja program Badan P2SDM merupakan target yang akan dicapai oleh Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor hingga Tahun 2024 adalah tersaji pada dibawah ini.

Tabel 13. Target Kinerja BDLHK Bogor Tahun 2020-2024

Sasaran IKK	IKK	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
01-Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) / Hutan Diklat	01-Nilai KHDTK yang dikelola	poin	66,5	67	68	69	70
02-Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	02-Lulusan diklat aparatur dan non aparatur LHK	orang	660	270	270	270	270
	03-Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan Wirausaha	orang	-	180	180	180	180
03-Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan hidup	04-Jumlah SDM masyarakat yang terlatih, peduli dan berbudaya lingkungan	orang	150	150	150	150	150

4.3 Kerangka Pendanaan

Untuk menyelenggarakan seluruh program dan kegiatan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai. Dana utama penyelenggaraan diklat kehutanan bersumber dari dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sedangkan pembiayaan yang bersumber dari dana lain seperti bantuan luar negeri, kerjasama kediklatan, serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat merupakan dana komplemen yang besarnya tidak dapat diprediksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun alokasi anggaran kegiatan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor Tahun 2020 - 2024 adalah sebesar Rp72.458.380.000,- dengan rincian seperti pada tabel berikut.

Tabel 14. Rencana Alokasi Pembiayaan Balai Diklat LHK Bogor Tahun 2020-2024

Kegiatan	Alokasi Anggaran <i>(dalam 1.000)</i>					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK	1.647.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	8.787.000
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.560.000
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	12.236.380	12.225.000	12.700.000	12.450.000	12.500.000	62.111.380
TOTAL ALOKASI	14.243.380	14.310.000	14.785.000	14.535.000	14.585.000	72.458.380

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor ini adalah bagian dari upaya pencapaian sasaran kinerja Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM serta Renstra Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Renstra Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan melalui Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan LHK. Oleh karena itu, penyusunan renstra ini sangat memperhatikan isu kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana tertuang pada indikator kinerja yang hendak dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Disadari bahwa akses data dan informasi kebutuhan diklat dari para pengguna diklat masih terbatas. Maka, penetapan sasaran kinerja pada renstra ini sebagian masih bersifat indikatif dan umum dengan jumlah target berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada renstra periode 2015-2019. Dalam kondisi yang demikian, diharapkan renstra ini lebih fleksibel dalam mengantisipasi kebutuhan diklat yang dinamis

Rencana Strategis Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor tahun 2020-2024 ini juga merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

I.

MATRIK TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN BALAI DIKLAT LHK BOGOR

Prog./ Keg.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama Sasaran Program/Indikator Kinerja Program Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan /Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan													
Sasaran Strategis 4 - Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing													
	IKU 13 - Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan												
	IKU 19 – Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK												
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi								2.007	2.085	2.085	2.085	2.085	
Sasaran Program : 1.Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) / Hutan Diklat; 2. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK.													
IKP - Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK/Hutan Diklat													
IKP - Peningkatan kompetensi SDM LHK													
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK Sasaran: 1. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) / Hutan Diklat 2. Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan								1.647	1.785	1.785	1.785	1.785	BDLHK Bogor/ Jawa Barat
IKK - Nilai KHDTK yang Dikelola													
Output : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup		Poin	66,5	67	68	69	70	650	645	645	645	645	
Komponen 1	Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan	Poin	66,5	67	68	69	70	650	645	645	645	645	

Prog./ Keg.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama Sasaran Program/Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan /Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKK - Lulusan diklat aparatur dan non aparatur LHK													
Output : Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Orang	660	270	270	270	270	997	780	780	780	780	
Komponen 1	Pelatihan teknis dan fungsional	Orang	660	90	90	90	90	766	390	390	390	390	
Komponen 2	Pendukung kediklatan	-	-	-	-	-	-	231	30	30	30	30	
Komponen 3	Pelatihan Non Aparatur LHK	Orang	-	180	180	180	180	-	360	360	360	360	
IKK - Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha													
Output : Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK		Orang	180	180	180	180	180	-	360	360	360	360	
Komponen 1	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK	Orang	180	180	180	180	180	-	360	360	360	360	
IKP - Jumlah lembaga / komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup													
Kegiatan 2: Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan <u>Sasaran:</u> Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan hidup								360	300	300	300	300	BDLHK Bogor/ Jawa Barat
IKK - Jumlah SDM masyarakat yang terlatih, peduli dan berbudaya lingkungan													
Output : Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Orang	150	150	150	150	150	360	300	300	300	300	
Komponen 1	Pelatihan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Orang	150	150	150	150	150	360	300	300	300	300	

Prog./ Keg.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama Sasaran Program/Indikator Kinerja Program Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan /Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen								12.236	12.225	12.700	12.450	12.500	
Sasaran Program													
1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima;													
IKP - Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM													
Kegiatan 3: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Badan P2SDM Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Badan P2SDM								12.236	12.225	12.700	12.450	12.500	BDLHK Bogor/ Jawa Barat
IKK - Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM													
IKK - Level Maturitas SPIP													
IKK - Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK													
Output : Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1	11.581	11.390	11.680	11.680	11.680	
Komponen 1	Gaji dan Tunjangan							7.966	8.210	8.500	8.500	8.500	
Komponen 2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor							3.615	3.180	3.180	3.180	3.180	
Output : Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1	60	220	220	220	220	
Komponen 1	Penyusuna rencana program dan anggaran							16	37	37	37	37	
Komponen 2	Pelaksanaan pemantaun dan evaluasi								16	16	16	16	
Komponen 3	Pengelolaan kepegawaian							20	75	75	75	75	
Komponen 4	Pelayanan umum dan Perlengkapan							16	93	93	93	93	
Output : Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1	595	615	800	550	600	
Komponen 1	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran							434	615	300	250	250	
Komponen 2	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan							161	-	500	300	350	

BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BOGOR
2020